

PROPOSAL
HIBAH PENGEMBANGAN INOVASI MODUL DIGITAL
MOOC UNIVERSITAS AIRLANGGA 2022
SKEMA MATA KULIAH

“Hukum Laut”



PENGUSUL :

Ketua : A Indah Camelia, SH, MH

Anggota : Dr Enny Narwati, SH., MH

UNIVERSITAS AIRLANGGA
2021

Lampiran 2. Lembar Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. a. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
b. Alamat Perguruan Tinggi : Kampus C Mulyorejo, Surabaya – 60115, Indonesia
c. Nama Fakultas : Hukum
d. Nama Program Studi : Ilmu Hukum
e. Judul MOOC : Hukum Laut
f. SKS : 2 sks
g. Semester : Ganjil/ Genap
f. Skema Hibah : Mata Kuliah

2. Koordinator/Ketua
 - a. Nama Lengkap & Gelar : A Indah Camelia, SH, MH
 - b. NIP : 198209152010122002
 - c. Golongan Kepangkatan : III b
 - d. Jabatan Akademik : Asisten Ahli
 - e. Alamat e-Mail : indah.camelia@fh.unair.ac.id
 - f. No Telpon : 085755683931

3. Biaya yang Diajukan : Rp. 25.000.000,-
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 8 Bulan
5. Dana Pendamping (jika ada) :-

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga



Dr. Emy Narwati, S.H., M.H
NIP. 196412111990022001

Surabaya, 25/11/ 2021

Penanggung Jawab Program, (Pengusul)

A. Indah Camelia, SH, MH
NIP. 198209152010122002

Lampiran 3. Lembar Kesanggupan

**Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Hibah Pengembangan
Inovasi Modul Digital MOOC Unair 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A Indah Camelia, SH, MH
NIP :198209152010122002

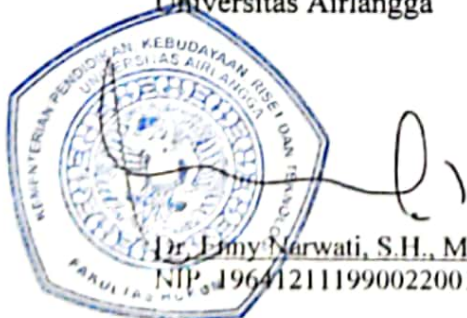
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

Mengetahui,
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Surabaya, 25/11/ 2021

Penanggung Jawab Program, (Pengusul)



Dr. Jimmy Narwati, S.H., M.H.
NIP. 196412111990022001



A. Indah Camelia, SH, MH
NIP. 198209152010122002



Daftar Isi

Halaman cover	
Halaman Pengesahan	
Lembar Kesanggupan	
Bab 1 Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Sasaran	3
4. Ruang Lingkup	3
Bab 2 Proses Pengembangan MOOC	4
1. Analisis Pengembangan Program	4
2. Desain Dan Pengembangan Konten	4
Bab 3 Rencana Anggaran	6
Bab 4 Jadwal Program	7
1. Jadwal Pelaksanaan Program	7
2. Jadwal dan Deskripsi Mata Kuliah Hukum Laut	8
Bab 5 Penutup	13



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Airlangga menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Universitas Airlangga secara kontinu selalu berupaya untuk berinovasi dan berkembang salah satunya di bidang pengajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk mengikuti perkembangan zaman, namun juga untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran bagi siswa. Sehingga target dan outcome pembelajaran dapat dicapai dengan tepat dan optimal.

Pengajaran adalah salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yang menjadi kewajiban dosen untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas Airlangga sebagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia senantiasa adaptif dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik termasuk dalam teknologi pembelajaran terhadap perkembangan teknologi kondisi yang dinamis. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Universitas Airlangga adalah Penggunaan feature pembelajaran e- learning Universitas Airlangga (HEBAT) dan ALMA sebagai platform pembelajaran daring guna meningkatkan efektifitas pembelajaran di lingkungan Universitas Airlangga dengan mengikuti perkembangan zaman dan kondisi terkini.

Pembatasan pergerakan orang karena Pandemi Covid-19, berdampak bagi perubahan perilaku masyarakat dan institusi Pendidikan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai media pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran daring (*e-learning*) dengan memanfaatkan perangkat lunak menjadi solusi yang paling tepat ditengah situasi Pandemi Covid-19. Sebelum adanya pengaturan atas pembatasan pergerakan masyarakat, Universitas Airlangga melalui PIPS Universitas Airlangga telah memberlakukan aturan internal tentang pelaksanaan pembelajaran e-learning melalui laman HEBAT maksimal 10% dari total tatap muka pembelajaran. Sehingga metode pembelajaran ini bukan menjadi hal baru bagi civitas akademika UNAIR. Namun,



pandemi menjadikan pembelajaran e-learning menjadi lebih masif dilakukan sebagai solusi konstruktif untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Laut merupakan sektor yang penting dalam menggerakkan dan meningkatkan perekonomian nasional suatu negara serta faktor pemersatu bangsa. Selain itu, Kekayaan laut Indonesia tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir apabila dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun pengetahuan masyarakat terkait hukum laut, pengelolaan sumber daya laut serta praktik hukum laut di Indonesia relatif rendah. Sebagai besar masyarakat masih mempersamakan antara hukum laut dan hukum laut. Hukum Laut merupakan bidang hukum fungsional yang bersifat dinamis dengan didalamnya meliputi hukum internasional, hukum sumber daya laut, dan hukum penyelesaian sengketa internasional.

Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mata kuliah Hukum Laut ditempatkan dan diampu oleh para dosen pada Bagian Hukum Internasional dikarenakan pembelajaran pada mata kuliah ini dititikberatkan pada aspek hukum internasional dan *United nation on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagai sumber hukum utama. Mata Ajar Hukum Laut adalah mata ajar yang masuk dalam kategori Mata Ajar Wajib Fakultas, dan ditawarkan setiap semester. Oleh karenanya, semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memenuhi prasyarat, yaitu telah menempuh Mata Ajar Hukum Internasional wajib untuk menempuh Mata Ajar ini.

2. Tujuan

Tujuan dari program ini adalah tidak hanya memperkenalkan hukum laut kepada masyarakat pada umumnya dan pentingnya hukum laut bagi Indonesia. Selain itu program ini juga diharapkan dapat memberikan panduan sehingga masyarakat mampu menganalisa secara umum dan membedakan hukum laut dengan hukum maritim. Selain itu juga, dengan program MOOC ini diharapkan memberikan gambaran hukum laut di Indonesia, perikanan laut, wewenang atas wilayah laut serta hak dan kewajiban Indonesia sesuai hukum internasional pada masyarakat umum. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin mengoptimalkan tercapainya target pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang.



Selain itu, Program Pembelajaran daring hukum laut melalui program Massive Open Online Course (MOOC) yang sepenuhnya didukung penuh oleh Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia praktis sekaligus menjadi bukti kepedulian UNAIR kepada khalayak umum untuk memberikan solusi yang konstruktif dalam rangka mencerdaskan bangsa dan berkontribusi pada pembangunan terutama dalam dunia hukum khususnya hukum laut.

3. Sasaran

Output Program tidak hanya ditujukan bagi kalangan mahasiswa Universitas Airlangga tetapi juga bagi peminat di bidang laut, praktisi hukum, pemerintah, pelaku bisnis pelayaran dan perikanan, serta masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup proses pembelajaran ini terdiri dari : 14 kali pertemuan dengan rincian tujuh (7) kali pertemuan sebelum ujian tengah semester (UTS) dan tujuh (7) kali pertemuan sebelum ujian akhir semester (UAS). Sehingga Jadwal pembelajaran akan disesuaikan dengan jadwal akademik perkuliahan yang ditetapkan Universitas Airlangga dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada awal atau akhir pertemuan akan diadakan pre-test atau post test sederhana dengan menggunakan fitur pada website MOOC Unair, lama HEBAT e-learning ataupun fitur lain (misal : kahoot, dll) yang ditautkan pada website MOOC Unair sehingga dapat dikoreksi secara otomatis.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup program ini adalah sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) serta Kontrak Perkuliahan mata kuliah Hukum Laut pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



BAB 2

PROSES PENGEMBANGAN MOOC

1. Analisis Pengembangan Program

Hukum Laut merupakan mata kuliah wajib fakultas dalam struktur kurikulum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dimana mata kuliah ini wajib dan diberikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum pada tingkat dua (2) atau telah menempuh mata kuliah prasyar sesuai ketentuan akademik fakultas. Untuk menempuh mata kuliah ini mahasiswa diwajibkan sebelumnya telah menempuh dan lulus pada mata kuliah Hukum Internasional sebagai mata kuliah prasyarat. Untuk dapat menempuh mata kuliah prasyarat yang ditentukan, mahasiswa diharuskan lulus mata kuliah dasar yang ada pada semester satu (1) dan dua (2). Secara formil, mahasiswa pada tingkat ini diharapkan telah memiliki pengetahuan dasar akan prinsip, teori, dan norma dalam peraturan perundang-undangan dan kemampuan analisis yang konstruktif sehingga akan dapat memahami materi hukum laut secara komprehensif. Bahan materi pembelajaran mata kuliah hukum laute antara lain: buku, kasus, jurnal dan artikel ilmiah yang digunakan menjadi referensi dalam proses pembelajaran.

2. Desain dan Pengembangan Konten

Program pengembangan Konten MOOC Hukum Laut ini akan dilaksanakan dalam 3 tahapan utama, yakni :

1. Tahapan Persiapan

- a) Dalam tahap ini, pengusul akan mengumpulkan materi terkait perkuliahan yaitu Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara Perkuliahan (SAP) serta kontrak perkuliahan, yang nantinya mengkontruksi menjadi bentuk kuliah daring.
- b) Kemudian, konsultasi dan brainstorming dengan tim program dan pengajar juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa program ini sesuai dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum fakultas.
- c) Berikutnya, akan dibuat rancangan jadwal pembagian peran, dan pengambilan gambar.



2. Tahap Pengembangan Pertama

Tahap pengembangan 1 ini adalah tahap Pembuatan MOOC untuk materi pertemuan 1-7 Hukum Laut. Tahapan ini dimulai dengan: pembuatan script, perekaman, editing, serta posting video materi yang telah ditentukan. Desain kuliah ini akan bersifat monolog dimana dosen akan merekam selama sekitar 7-15 Menit untuk setiap pertemuan sesuai jadwalnya. Kemudian, Dosen juga akan memposting video perkuliahan yang akan dibantu oleh DIPP - UNAIR. video ini nantinya akan bersifat terbuka (open access) dan dapat diakses diwebsite MOOC Unair. Pada awal atau akhir pertemuan akan diadakan pre-test atau post test sederhana dengan menggunakan fitur pada website MOOC Unair, HEBAT ataupun fitur lain (misal : kahoot, dll) yang ditautkan pada website MOOC Unair sehingga dapat dikoreksi secara otomatis.

3. Tahap Pengembangan kedua

Tahap pengembangan 2 dilakukan sama seperti pada prosedur tahapan pengembangan yang pertama (1), hanya saja materi yang akan dikembangkan adalah materi pertemuan 8-14 dari mata kuliah Hukum Laut.



BAB 3

RENCANA ANGGARAN

Anggaran yang dibutuhkan oleh pengusul adalah terdiri dari pembelian referensi berupa buku ataupun jurnal, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan alat perekaman, alat komunikasi, pengadaan alat audio visual, biaya operasional, biaya perekaman, biaya editing, biaya rapat-rapat persiapan dan pelaksanaan program, serta administrasi pembuatan laporan kemajuan, akhir serta keuangan. Rancangan pengajuan anggaran biaya, yang diperlukan untuk melaksanakan inovasi pembelajaran ini adalah **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** sesuai dengan panduan Hibah Inovasi Pembelajaran MOCC UNAIR Skema Mata Kuliah. Adapun rincian rancangan pengajuan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Bahan habis pakai dan peralatan (50%)	12.500.000,-
2	Perekaman (15%)	3.750.000,-
3	Editing (15%)	3.750.000,-
4	Lain-lain: administrasi, monitoring dan evaluasi, laporan (20%)	5.000.000,-
	Total	<u>25.000.000,-</u>



BAB 4

JADWAL PROGRAM

1. Jadwal Pelaksanaan Program

Sesuai dengan Satuan Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Laut yang berbobot 2 SKS, maka proses pembelajaran daring (*online*) mata kuliah ini akan dilaksanakan melalui 14 kali pertemuan dengan rincian tujuh (7) kali pertemuan sebelum UTS dan tujuh (7) kali pertemuan sebelum UAS. Sehingga Jadwal pembelajaran akan disesuaikan dengan jadwal akademik perkuliahan yang ditetapkan Universitas Airlangga dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Jadwal rencana pelaksanaan program hibah Inovasi Pembelajaran MOOC Skema Mata Kuliah Hukum Laut ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Bulan Pelaksanaan						
		5	6	7	8	9	10	11
1	Pembuatan Proposal	■						
2	Pengumpulan Bahan		■					
3	Pengerjaan Pembelajaran 7 topik			■				
4	Laporan Kemajuan				■			
5	Pengerjaan Pembelajaran 7 topik					■		
6	Laporan Akhir						■	
7	Monitoring dan Evaluasi						■	
8	Laporan Keuangan							■



2. Jadwal dan Deskripsi Mata Kuliah Hukum Laut

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah menempuh mata ajar Hukum Laut ini, maka mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep, teori dan aturan dalam Hukum Laut sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu memberikan analisa serta solusi terhadap permasalahan Hukum Laut yang terjadi berdasarkan ketentuan Hukum Internasional.

Deskripsi Mata Kuliah :

Materi yang akan dipelajari selama menempuh Mata Ajar Hukum Laut ini yaitu diawali dengan memberikan pengetahuan tentang Hukum Laut, pengertian dan sejarah Hukum Laut, menetapkan baseline dan pembagian zonasi dalam Hukum Laut, yaitu zona laut yang berada di bawah kedaulatan Negara, zona laut dengan rezim hak berdaulat Negara, yaitu zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen serta zona-zona laut yang berada di luar yurisdiksi suatu negara seperti laut lepas dan area. Selain itu juga membahas mengenai perlindungan lingkungan laut, sumberdaya perikanan serta penyelesaian sengketa dalam hukum laut.

Pertemuan Pembelajaran Mata Kuliah :

Pertemuan	Topik	Metode	Media	Bahan	Tugas
1	Pengantar Hukum Laut: a. Sejarah b. Definisi c. Ruang Lingkup	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT & Zoom	• Ppt • Video • referensi	• Lecture • Selfstudy
2	Zonasi Dalam Yurisdiksi nasional dalam UNCLOS 1982	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT & Zoom	• Ppt • Video • Referensi	• Lecture • Selfstudy
3	Zonasi di-luar Yurisdiksi Nasional dalam UNCLOS 1982	Non Tatap Muka (Asynchronous)	HEBAT & Zoom	• Ppt • Video • Referensi	• Lecture • Selfstudy
4	Baseline	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT	• Ppt • Video • Referensi	• Forum Diskusi • Quiz
5	Laut Teritorial & Zona Tambahan	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT & Zoom	• Ppt • Video • Referensi	• Lecture • Selfstudy •



6	Negara Kepulauan	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT & Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Ppt• Video• Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Lecture• Selfstudy
7	Navigasi (Lintas)	Non Tatap Muka (Asynchronous)	HEBAT	<ul style="list-style-type: none">• Ppt• Video• referensi	<ul style="list-style-type: none">• Forum Diskusi• Assignment
UTS					
8	Zona Ekonomi Eksklusif	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT & Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Ppt• Video• Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Lecture• Selfstudy
9	Landas Kontinen	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT	<ul style="list-style-type: none">• Ppt• Video• Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Forum Diskusi• Quiz
10	Area (Dep-sea Bed)	Non Tatap Muka (Asynchronous)	HEBAT & Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Ppt• Video• Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Lecture• Selfstudy
11	Laut Bebas	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT	<ul style="list-style-type: none">• Ppt• Video• Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Forum Diskusi• Assignment
12	Perikanan Laut	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT & Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Ppt• Video• Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Lecture• Selfstudy
13	Lingkungan Laut	Non Tatap Muka (Asynchronous)	HEBAT & Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Ppt• Video• Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Lecture• Selfstudy
14	Penyelesaian Sengketa Hukum Laut	Tatap Muka (Synchronous)	HEBAT & Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Ppt• Video• Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Lecture• Selfstudy
UAS					

Penjelasan Topik Pembelajaran Mata Kuliah :

1. Pertemuan 1 : Pengantar Hukum Laut

Pada pertemuan pertama akan dibicarakan mengenai pengertian-pengertian dasar serta prinsip-prinsip utama yang berlaku di Hukum Laut, ruang lingkup, doktrin Res nullius, res communis, mare liberum, mare clausum, serta sejarah perkembangan Hukum Laut. Pembahasan sejarah ini dimulai sejak pengaturan laut pada masa Abad Pertengahan hingga berlakunya the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. yang disebut sebagai “*the constitution of the ocean*”.

2. Pertemuan 2 : Zonasi Dalam kedaulatan negara dalam UNCLOS 1982

Pertemuan kedua membahas mengenai dasar zona-zona maritim yang berada pada



kedaulatan nasional sebuah negara, yakni perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.

3. Pertemuan 3 : Zonasi di-luar Yurisdiksi Nasional dalam UNCLOS 1982

Pertemuan ketiga membahas mengenai dasar zona-zona maritim yang berada diluar kedaulatan negara, namun masih dalam yurisdiksi nasional, yakni zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kemudian juga membahas zona-zona maritim yang menjadi yurisdiksi hukum internasional yaitu: , laut bebas dan area.

4. Pertemuan 4 : Baseline

Semua zona-zona laut menurut UNCLOS 1982, diukur dari sebuah garis imajiner yang disebut sebagai garis pangkal (baseline). Pada pertemuan ke-4 dibahas mengenai jenis-jenis garis pangkal, yakni : titik pangkal, garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal lurus kepulauan.

5. Pertemuan 5 : Laut Teritorial & Zona Tambahan

Pada pertemuan ke-5 dibahas mengenai jenis-jenis garis pangkal, yakni : titik pangkal, garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal lurus kepulauan.

6. Pertemuan 6 : Negara Kepulauan

Bangsa Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan Hukum Laut modern melalui keberhasilan diadopsinya konsep Negara Kepulauan dalam Deklarasi Juanda oleh UNCLOS 1982. Sehingga pada pertemuan ini akan membahas mengenai : konsep dan sejarah negara kepulauan, archipelago, serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

7. Pertemuan 7 : Navigasi (Lintas)

Pertemuan ke-7 membahas mengenai lintas (navigasi) dan hak lintas bagi kapal asing pada zona laut sebuah negara, yaitu : lintas damai, lintas transit, lintas alur laut kepulauan, dan hak akses negara lain.

8. Pertemuan 8 : Zona Ekonomi Eksklusif

Pertemuan ke-8, khusus untuk membahas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982. Pada bahasan ZEE akan didiskusikan terkait dengan : lebar



ZEE, doktrin hukum, hak berdaulat, serta hak dan kewajiban negara pantai yang dimiliki pada ZEE.

9. Pertemuan 9 : Landas Kontinen

Pertemuan ke-9, khusus untuk membahas mengenai landas kontinen menurut UNCLOS 1982. Pada pembahasan ini akan didiskusikan terkait dengan : lebar landas kontinen, doktrin hukum, hak berdaulat, serta hak dan kewajiban negara pantai yang dimiliki pada zona maritim ini.

10. Pertemuan 10 : Area (Dep-sea Bed)

Pertemuan ke-10 membahas mengenai area (dep-sea bed) yang merupakan zona yang berada diluar yurisdiksi nasional sebuah negara. Pada pembahasan ini akan didiskusikan terkait dengan : area (dep-sea bed), prinsip common heritage of mankind, serta international Sea Bed Authority (ISA).

11. Pertemuan 11 : Laut Bebas

Pada pertemuan ke-11 dibahas mengenai laut bebas, yakni : yurisdiksi negara bendera, yurisdiksi universal, piracy dan prinsip *freedom of the high seas*.

12. Pertemuan 12 : Perikanan Laut

Pertemuan ini pada dasarnya menyajikan materi yang berisi mengenai konservasi sumber daya laut, perikanan, konservasi, reservasi, *allowable yearly catch*, illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing, Sustainable Fisheries serta Kerjasama regional/internasional dalam pengelolaan perikanan internasional menurut UNCLOS 1982.

13. Pertemuan 13 : Lingkungan Laut

Pertemuan ini pada dasarnya menyajikan materi yang berisi mengenai konservasi, pelestarian, manajemen sumberdaya laut, serta hak dan kewajiban negara atas lingkungan laut, agar laut beserta sumberdaya yang terkandung di dalamnya tetap lestari dan berkelanjutan hingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.



14. Pertemuan 14 : Penyelesaian Sengketa Hukum Laut

Materi penyelesaian sengketa laut sangat penting untuk disampaikan agar mahasiswa memahami bagaimanakah sebuah sengketa yang berkaitan dengan Hukum Laut dapat diselesaikan melalui cara damai, baik menggunakan cara diplomasi ataupun non-litigasi (negosiasi, mediasi, dan arbitrase), melalui International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS), dan International Court of Justice (ICJ).



BAB 5

PENUTUP

Besar harapan kami program ini dapat terpilih, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target pembelajaran yang optimal melalui inovasi-inovasi pengajaran mata kuliah hukum laut menjadi yang lebih *up to date*. Kedepannya program pembelajaran akan menjadi lebih dinamis dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga proses belajar dapat dilakukan dimanapun, kapanpun tidak hanya terbatas pada pembelajaran tatap muka konvensional. Program MOOC merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang diperuntukkan menjawab perubahan-perubahan tersebut.